

RINGKASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak di Kabupaten Purbalingga dibentuk dengan tujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dan memberikan perlindungan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial melakukan koordinasi dan kerjasama dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu. Kegiatan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan ini dilaksanakan pusat pelayanan terpadu Kabupaten, unit pusat pelayanan terpadu Kecamatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data DINSOSDALDUKBP3A masih banyak kasus kekerasan terjadi di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 dan kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, di mana yang dipelajari dan diteliti adalah mengenai hukum dalam pelaksanaan (*law in action*). Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak di Kabupaten Purbalingga dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan yang dikemukakan Soerjono Soekanto, berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini sebagian besar anggota pusat pelayanan terpadu Kabupaten termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, unit pusat pelayanan terpadu Kecamatan dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini mempunyai kesadaran dan ketaatan hukum untuk menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Di sisi lain, terdapat pula kendala-kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya belum didukungnya sarana prasarana yang memadai, anggaran dan personil yang terbatas, kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah, serta budaya patriarki yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: efektivitas, perlindungan korban

SUMMARY

Purbalingga Regency Regional Regulation number 2 of 2017 concerning the implementation of the Protection of Victims of Gender-based Violence and Children in Purbalingga Regency was formed to preventing violence, and providing protection in the form of complaint services, health, social rehabilitation, assistance and law enforcement, repatriation and social reintegration. as well as coordinating and collaborating to increase community participation, all of which are carried out by integrated services. Activities for the Protection of Victims of Violence are carried out by integrated district service centers, sub-district units, and social services, as well as population control and women's empowerment and child protection. Based on data from DINSOSDALDUKBP3A, there are still many cases of violence occurring in the Purallingga district. Therefore, it can be formulated that the problem is about how effective the implementation of regional regulation Number 2 of 2017 is and also other obstacles that occur in the regional regulation.

The approach method used in this research is the sociological juridical method which is studied and researched about the law in its implementation (law in action) while the data sources used are primary and secondary data. Primary data itself is obtained directly from the source, while secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials, all of which are obtained from interviews and literature studies which are ultimately analyzed qualitatively.

The results of the study show that the implementation of the Purbalingga Regency regional regulation number 2 of 2017 concerning the implementation of the protection of victims of gender-based violence and children is seen from the many things that affect the effectiveness of the laws and regulations put forward by Soerjono Sukamto to be effective. In this study, there are several members of the district integrated service center including the police, prosecutors, sub-district units and social services for population control, family planning, women's empowerment and child protection used as implementing regional regulations which also have the awareness and legal compliance to provide victim protection. Gender and child-based violence is in accordance with the main tasks of their respective functions, and although there are obstacles in its implementation, such as the absence of adequate infrastructure, budget, and limited personnel, as well as the lack of socialization related to regional regulations, patriarchal culture.

Keyword: effectiveness, victim protection